

PENGUATAN KARAKTER ETIKA ISLAM DALAM BIROKRASI**Gianni Indira¹, Erlina Sari Piliang² dan Zahratul Husna³**^{1, 2 dan 3}Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RiauKampus Panam Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 15, Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru
Email : 12070526490@students.uin-suska.ac.id¹, 12070526452@students.uin-suska.ac.id²
dan 12070526485@students.uin-suska.ac.id³**ABSTRAK**

Karakter etika yang Islami merupakan cara berperilaku manusia yang berhubungan erat dengan nilai-nilai ajaran Islam untuk hidup bersosial, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pelaksanaan dan birokrasi di Indonesia perlu dikaitkan dengan peran pentingnya ajaran Islam di kalangan para birokrat. Peran birokrat yang Islami dalam memberikan pelayanan kepada publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk membentuk karakter etika birokrat yang Islami sesuai dengan sumber-sumber Islam khususnya dalam Al-Qur'an dan Hadits. Metode yang dipakai dalam pembahasan ini yaitu metode yang berdasarkan kepada *literature review* (studi pustaka). Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa etika dalam birokrasi pemerintahan sangat menentukan keberhasilan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang birokrat. Dengan etika Islam membuat para birokrat paham agama yang akan membimbing mana yang benar dan mana yang salah. Maka membentuk etika birokrat yang Islami perlu sifat dan karakter Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Dengan merealisasikan nilai-nilai Islami dalam birokrasi pemerintah akan mengarahkan para perilaku birokrat ke arah yang lebih baik lagi, agar tidak terjadi maladministrasi di ranah pemerintahan.

Kata Kunci : Etika Islam, Birokrat, Birokrasi Pemerintah dan Pelayanan Publik.**ABSTRACT**

Islamic character is a way of human behavior that is closely related to the values of Islamic teachings for social life, both within the family, community, nation and state. Implementation and Activities in Indonesia need to follow the importance of Islamic teachings among followers. The role of Islamic bureaucrats in providing services to the public. The purpose of this study is to form the ethical character of Islamic bureaucrats in accordance with Islamic sources, especially in the Qur'an and Hadith. The method used in this discussion is a method based on a literature review. The results of this discussion indicate that ethics in government greatly determines the success of the work carried out by a bureaucrat. With Islamic ethics, bureaucrats understand religion which will guide what is right and what is wrong. Thus, forming a formal bureaucratic ethic requires the nature and character of Islam which is sourced from the Qur'an and Hadith. By realizing Islamic values in the government, the government will direct the behavior of bureaucrats in a better direction, so that there is no maladministration in the realm of government.

Keywords : Islamic Ethics, Bureaucrat, Government Bureaucracy and Public Service.

PENDAHULUAN

Pembentukan karakter dapat diidentifikasi dengan penguatan karakter yang memiliki etika dan moral yang baik dalam berperilaku, bertindak, dan mengambil keputusan, serta sepenuh hati menampilkan kebaikan dalam setiap aktivitas kehidupan sehari-hari (Imam Tabroni; Dean Dwi Putra; Najah Adawiah; Rosmiati, 2022). Etika dan moral berhubungan dengan definisi karakter dari penilaian tindakan manusia apakah itu baik atau buruk, ini merupakan termasuk kajian bidang filsafat yang ada di semua manusia setiap saat (Ahmed, 2020). Etika dan moral menjadi landasan berperilaku dan bertindak para birokrat penyelenggara pemerintahan. Ketika masyarakat tidak diberikan pelayanan publik yang semestinya, pasti masyarakat akan mempertanyakan etika dari para birokrat pemerintah tersebut (Grandani Lontoh; Ventje Kasenda; Josef Kairupan, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pengaturan hubungan pemerintah dengan masyarakat di dalamnya terjadisuatu proses pelayanan (Rusdi; Afrinaldy Rustam, 2021). Menurut acuan hukum pelayanan publik, bahwa birokrasilah yang mendorong terjadinya proses pelayanan kepada masyarakat demi mencapai tujuan pemerintahan dan masyarakat. Proses pelayanan publik ini merupakan tugas para birokrat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Putra, 2020). Tetapi pada kenyataannya, banyak masyarakat yang tidak diberikan pelayanan publik yang baik oleh para birokrat pemetintah, masyarakat lalu mempertanyakan etika birokrat tersebut. Padahal agama mayoritas di Indonesia adalah mayoritas Islam, tetapi karakter para birokrat bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam. Cara berperilaku birokrat yang selalu erat dengan nilai-

nilai ajaran Islam pasti akan bertanggung jawab atas pekerjaannya karena untuk hidup bersosial, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara (Nawawi, 2018).

Islam berkaitan erat dengan berbagai aspek bidang kehidupan manusia. Kedatangan Islam hadir untuk memperbaiki dan mengatur tatanan kehidupan bagi kemaslahatan seluruh umat manusia, begitu juga di bidang pemerintahan (Rodi Wahyudi; Devi Deswimar, 2017). Dalam birokrasi sendiri itu menetapkan perilaku karakter yang dijadikan sebagai pedoman etika bagi para birokrat yang bekerja melayani masyarakat (Jusman Iskandar; Alfiah; Amalia Nur Fajriah; Anggun Dwi Rahmawati; Anisa Sofiani, 2020). Begitu juga konsep nilai-nilai etika dan moral dalam administrasi publik diterapkan dalam kehidupan ruang lingkup bernegara, manfaat dari konsep etis sangat terasa dalam dinamika administrasi pemerintahan (Nawawi, 2018). Etika yang berlandaskan Islam merupakan sebuah konsep etika yang didasarkan pada ajaran dan prinsip Islam yang diimplikasi dari nilai-nilai tauhid keimanan seseorang (Shahrul Nizam bin Salahudin; Siti Sarah binti Baharuddin; Muhammad Safizal Abdullah; Abdullah Osman, 2016).

Namun, Indonesia yang merupakan negara mayoritas beragama Islam. Faktanya di negara kita masih sering terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial perilaku dari para birokrat, seperti perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah bentuk penyalahgunaan wewenang kekuasaan (Mamadaliyeva, 2018). Perilaku buruk birokrat pemerintah mengakibatkan tekanan sosial psikologi kepada masyarakat yang datang berurusan ke kantor pemerintah. Sebelum berangkat ke kantor mereka telah membayangkan susahnya urusan, menunggu lama, tidak jelas berapa rupiah

yang harus dikeluarkan, syarat yang perlu disiapkan, serta sikap birokrat yang kasar dan kurang ramah terhadap masyarakat (Wahyudi, 2020). Dalam sabda Rasulullah SAW. mengatakan "Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah Suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur" (HR. Ahmad). Sabda beliau ini adalah pernyataan tegas tentang tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (Rusdi; Afrinaldy Rustam, 2021).

Penelitian ini mempunyai hubungan relevansi dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya seperti penelitian (Wahyudi, 2020) berjudul Maladministrasi Birokrasi di Indonesia dalam Perspektif Sejarah, dengan penelitiannya tentang pelayanan publik yang diberikan birokrat cenderung banyak terjadi ketimpangan karakter maladministrasi birokrasi. Selanjutnya, penelitian (Mamadaliyeva, 2018) berjudul *Moral and Ethics of Islam*, dengan pokok bahasan tentang pandangan Islam dalam memandang moral dan etika. Maka daripada itu, penelitian ini lebih terfokus pada penguatan pembentukan karakter birokrat berlandaskan etika Islami. Berdasarkan dari penjelasan masalah yang dipaparkan, maka membentuk karakter etika birokrat yang Islami sesuai dengan sumber-sumber Islam khususnya dalam Al-Qur'an dan hadits, memberikan pandangan yang mengenai etika yang harus menjadi yang paling utama dalam pemikiran yang berusaha untuk mengatasi masalah sosial dalam masyarakat Muslim terutama di pemerintahan (Ahmed, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literatur review (studi pustaka) dalam membahas penguatan perilaku etika Islam dalam birokrasi. Literature review adalah kajian ilmiah di mana memberikan

gambaran yang fokus mengenai suatu topik tertentu, dengan begitu maka akan mengidentifikasi suatu teori atau metode terhadap suatu penelitian (Ns Utomo; Aris Hartono, 2019). Metode ini diharapkan dapat menjelaskan tentang realisasi karakter etika Islam dalam birokrasi untuk mencegah terjadinya maladministrasi di kalangan para birokrat (Wahyudi, 2020) karena agama di Indonesia mayoritas Islam, tetapi karakter para birokrat bertolak belakang dengan Islam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian literatur review ini, yaitu cara pengumpulan literatur yang diarahkan kepada pencarian literatur data dan informasi melalui dokumen-dokumen yang tertulis, seperti dokumen-dokumen tertulis dari buku dan jurnal kemudian dibahas dengan cara menganalisis serta menarik kesimpulan dari hasil pembahasan tentang topik yang diteliti (Dr. Farida Wahyu Ningtyas, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan etika birokrasi dalam pemerintahan dituangkan ke dalam kode etik Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63/ KEP/M. PAN/7/2003. Di bawah ini nilai dalam etika birokrasi yang dapat dijadikan sebagai acuan penuntun bagi para birokrat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu: (Jimmy Arief Saud Parsaoran, 2017).

1. Efisiensi, artinya tidak boros di mana sikap, perilaku, dan perbuatan para birokrat baik jika mereka efisien.
2. *Responsible*, artinya nilai yang berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
3. *Accountable*, artinya nilai ini merupakan tanggung jawab yang

bersifat objektif. Sebab birokrasi dikatakan akuntabel dimana mereka dinilai objektif oleh masyarakat karena dapat mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan dan sikap kewenangan yang dimiliki serta dapat mewujudkan apa yang diharapkan publik (pelayanan publik yang profesional dan dapat memberikan kepuasan publik).

4. *Responsiveness*, artinya birokrasi publik itu memiliki daya tanggap terhadap keluhan, masalah, dan aspirasi dari masyarakat dengan cepat dipahami dan berusaha memenuhi, yang tidak suka menunda-nunda waktu atau memperpanjang alur pelayanannya.

Seperangkat nilai etika dalam birokrasi yang dipaparkan di atas, kita bisa melihat bahwa hal itu selaras dengan

etika Islam yang akan kami bahas.

Secara jelas dikemukakan oleh Djadja Saefullah (2007:160) bahwa etika bagi pejabat publik terdapat dalam sumber-sumber etika yang secara hierarkis dari mulai agama sampai dengan perintah atasan (Gambar 1). Agama selayaknya ditempatkan sebagai sumber etika pemerintahan di Indonesia dalam derajat yang paling atas, karena menurut Djadja Saefullah (2006:172) bangsa dan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat religius. Para pejabat publik adalah bagian dari bangsa Indonesia dan anggota masyarakat Indonesia. Mereka terikat bukan hanya oleh norma atau ketentuan dalam lembaga tempat bekerjanya saja tetapi juga oleh norma dan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat umum. (Dr, 2016).

Gambar 1:
SUMBER ETIKA PEJABAT PUBLIK



Sumber : Djadja Saefullah (2007 : 160)

Agama mengandung banyak nilai dan norma etik yang apabila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dapat bernilai ibadah. Nilai dan norma etik dari agama ditujukan kepada semua orang yang mengimaninya yang bekerja di lapangan apapun termasuk di lapangan pemerintahan (dalam arti luas) tanpa mempersoalkan statusnya apakah pegawai negeri atau bukan, birokrat

(pejabat yang ditunjuk) atau nonbirokrat (pejabat yang dipilih), pejabat negara atau bukan, yang bekerja di pusat atau di daerah.

Pendapat ini senada dengan isi Tap MPR-RI No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang menyatakan bahwa arah kebijakan untuk membangun etika kehidupan berbangsa adalah mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan

budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara melalui pendidikan formal, non-formal, informal, dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat (Dr, 2016).

Dalam agama Islam misalnya, terdapat salah satu prinsip dasar etika yaitu :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Artinya : “Cintailah manusia (orang lain), seperti kamu mencintai dirimu sendiri” (Hadist Riwayat Bukhari).

Prinsip dasar ini menunjukkan pandangan Islam bahwa manusia harus saling menyayangi atau mengasihi satu sama lainnya walaupun kepercayaan atau keyakinan agamanya berbeda-beda. Islam harus menjadi rohmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam). Karena itu, berbuat baik kepada siapapun adalah kebajikan yang diwajibkan kepada semua umat Islam khususnya dan manusia umumnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Menurut keyakinan muslim, etika Islam dapat dijadikan pedoman oleh seluruh manusia, karena cocok dengan fitrah (naluri) dan akal pikiran manusia (manusiawi), praktis, tepat, dan dapat digunakan di segala waktu dan tempat. Dalam pandangan Islam, iman berhubungan positif dengan akhlak. Semakin kuat iman seseorang, semakin baik ahlaknya. Hal itu didasarkan pada Hadist (Riwayat Al Tirmidzi).

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

Artinya : “Orang mukmin yang sempurna imannya ialah yang terbaik budi pekertinya.” Oleh karena itu bagi mukmin, mengaplikasikan etika (berahlak mulia) dengan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam menjalankan tugasnya di lapangan pemerintahan, merupakan ibadah kepada Allah SWT”.

Prinsip dasar birokrasi adalah proses waktu pelayanan cepat, biaya murah,

tidak berbelit-belit, sikap dan perilaku para pegawai ramah dan sopan, ini yang selalu harus dijaga serta dilaksanakan tanpa mengenal pamrih. Dengan sendirinya akan berdampak terhadap orang yang dilayani akan diperlakukan hal yang sama atas kepuasan pelayanan karena para pelaksana birokrasi memegang prinsip etika dalam melaksanakan birokrasi (Wahyudi, 2020). Adab dan etika dalam perspektif Islam yang diperlukan dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh birokrat sangat perlu dipahami dengan baik. Tanpa bisa memahami dengan baik adab dan etika kerja tersebut, sudah pasti hasil dari suatu pelaksanaan pekerjaan tidak akan memuaskan hati. Di bawah ini akan dijelaskan adab dan etika dalam melaksanakan suatu pekerjaan, yaitu :

1. Diniatkan ikhlas karena Allah SWT.

Keikhlasan dalam berbuat sangat dipengaruhi oleh tingkat ketakwaan seseorang. Semakin baik ketakwaan maka pelaksanaan amanah yang diberikan kepada seseorang akan memberikan hasil yang baik pula. Keadaan pada hari ini pada saat birokrat sedang melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelayanan masyarakat, nilai-nilai ketakwaan ini dapat untuk ditampilkan lebih baik, padahal sebenarnya tidaklah baik. Seperti melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maksudnya di sini adalah terkesampingkannya nilai-nilai ketakwaan itu, dengan mendahulukan keinginan hawa nafsu.

2. Bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh (*itqon*)

Sebuah hadis diriwayatkan oleh Aisyah ra. tentang hal ini, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

Artinya : “Sesungguhnya Allah Swt. mencintai seorang hamba yang

apabila ia bekerja dia itqon (menyempurnakan) pekerjaannya”. (HR. Thabrani).

Pekerjaan yang asal-asalan atau bagaimana pekerjaan itu asal selesai saja yang menjadi tujuan, akan memperlihatkan penyelesaian amanah dan tanggung jawab yang tidak baik. Birokrat harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pelayanan yang baik tentu akan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Harus kita ingat bahwa pelayanan yang baik itu, adalah pelayanan yang memberikan kepuasan. Pelayanan publik yang baik itu juga disebut pelayanan yang melebihi harapan publik. Tanpa adanya ketekunan dan kesungguhan dari seorang birokrat, maka ini tidak akan terwujud.

3. Mengutamakan kejujuran dan amanah dalam bekerja

Birokrat yang tidak memiliki kejujuran dalam bekerja, sudah pasti juga tidak akan mampu untuk bersikap amanah. Kejujuran dan amanah berkaitan erat dengan tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah SWT. Ketakwaan yang baik akan mewujudkan kejujuran dan amanah yang baik. Birokrat adalah individu yang digaji oleh negara untuk melayani rakyat. Gaji seorang birokrat sudah ditentukan oleh negara berdasarkan perundangan yang berlaku. Birokrat harus mampu menjadikan profesinya sebagai sumber ladang amal kebajikan untuk meningkat derajat ketakwaannya di sisi Allah SWT.

4. Memahami dan menerapkan etika sebagai seorang Muslim

Islam adalah agama yang memiliki etika dan adab yang sangat menjunjung tinggi kesopanan maupun kehormatan seseorang. Dalam bekerja, etika sangat penting dilakukan agar dalam bekerja kita mencerminkan seorang Muslim yang santun dalam berbagai hal mulai dari tutur kata dalam memilih bahasa saat berbicara, bertegur sapa, berpakaian,

berinteraksi, bergaul dengan rekan maupun masyarakat, makan, minum, berhadapan dengan masyarakat, rapat, dan berbagai kegiatan lainnya. Etika ataupun akhlak yang diterapkan dalam pekerjaan merupakan suatu perwujudan dari kesempurnaan iman seorang mukmin.

Sumber etika seorang yang beriman kepada Allah Swt. adalah Al-Qur'an dan Hadits. Begitu banyak nilai-nilai etika di dalam Al-Qur'an yang telah dinyatakan oleh Allah Swt. Kalau umat yang beriman bisa untuk melaksanakan perintah Allah Swt. tersebut, maka akan selamatlah hidup di dunia dan selamat juga pada kehidupan akhirat yang kekal dan abadi.

5. Tetap memegang teguh prinsip-prinsip syari'ah

Selain menjaga etika dan akhlak, seorang Muslim juga wajib untuk tetap memegang teguh prinsip-prinsip syari'ah dalam pekerjaan yang digelutinya. Seperti para birokrat di suatu instansi pemerintahan, mereka melakukan pekerjaan proses birokrasi yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin pesatnya kemajuan zaman, prinsip-prinsip syari'ah dalam bekerja memang akan semakin sulit karena berkaitan dengan kemajuan, keuntungan, dan penghasilan lebih dari pekerjaan yang kita lakukan. Keadaan ini menjadi tantangan bagi iman para birokrat yang senantiasa meningkatkan keimanan dan mempertahankan kehalalan suatu pekerjaan serta meninggalkan hal-hal yang haram.

6. Menghindari syubhat

Sebuah hadis menjelaskan tentang syubhat, bahwa Rasulullah Saw. bersabda,

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي بَرَعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ

Artinya : “Sesungguhnya yang halal

itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram”.

Contoh syubhat yang biasa sering kita dengar yaitu adalah korupsi dan menerima uang syubhat (perkara yang diragukan). Yang ntah berasal dari mana uang itu didapatkan, apakah halal atau haram.

7. Menjaga ukhuwah Islamiyah

Ukhuwah yang terjaga dengan baik dalam sebuah instansi pemerintahan akan melahirkan suasana kebersamaan yang tinggi. Birokrat yang berada pada level atas, akan menjadi pelindung dan pengayom untuk birokrat yang berada pada level menengah dan bawah. Mereka akan semangat bekerja dengan penuh tanggung jawab karena pengembangan diri mereka terbuka sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kita yang seiman adalah saudara. Makakita harus dapat untuk menjaga hubungan dengan orang di sekitar kita.

Etika dan adab dalam birokrasi pemerintahan sangat menentukan keberhasilan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang birokrat. Pekerjaan birokrat memberikan pelayanan kepada masyarakat akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Maka membentuk etika birokrat yang Istami perlu sifat dan karakter Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Dengan prinsip tauhid Islam akan mengarahkan para perilaku birokrat ke arah yang lebih baik lagi, agar tidak terjadi maladministrasi di ranah pemerintahan, Dan juga merealisasikan nilai-nilai Islami dalam kehidupan

birokrasi adalah faktor utama untuk mencegah maladministrasi di kalangan para birokrat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Etika itu ilmu yang menjelaskan tentang tingkah laku manusia mana yang baik dan mana yang buruk. Etika birokrasi adalah norma atau nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi keseluruhan aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya demi kepentingan umum atau masyarakat. Dengan demikian, aparat pemerintah seharusnya mempunyai pedoman dan penuntun dalam sikap dan perilaku sehingga birokrasi menjadi bersih, dinamis, dan bertanggung jawab.
2. Peran penting ajaran etika Islam dengan prinsip tauhid akan menjadikan perilaku birokrat ke arah yang lebih baik dan dapat merealisasikan nilai-nilai tauhid dalam birokrasi pemerintahan adalah faktor utama mencegah terjadinya penyimpangan terutama dalam hal pelayanan birokrasi publik dengan unsur-unsur pokok pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, responsibilitas, dan keadilan.
3. Aspek tauhid Islam yang berhubungan dengan karakter perilaku para birokrat adalah keyakinan seorang birokrat bahwa Allah SWT maha segala-Nya, maha melihat, maha mendengar, dan maha mengetahui. Sehingga tidak berani melakukan pelanggaran kode etik karena setiap amal perbuatan akan dihisab di Akhirat kelak. Etika Islam membuat para birokrat paham agama yang akan membimbing mana yang benar dan mana yang salah. Perilaku

karakter yang baik dalam melayani masyarakat akan menjauhkan dari maladministrasi birokrasi seperti KKN dan menyalahgunakan kekuasaan.

Saran

Adapun saran dari kami yaitu dalam mencegah karakter perilaku maladministrasi para birokrat pemerintah adalah melalui penanaman norma sosial dan pengamalan etika Islam. Agama merupakan tuntunan hidup untuk menuntun seseorang agar selamat di dunia dan akhirat. Sejauh mana seseorang beramal mengikuti ajaran agama, maka hidupnya akan terarah, tenang, dan terhindar dari perilaku KKN dan menyalahgunakan kekuasaan. Hal itu solusi yang dapat dilakukan oleh para birokrat pemerintah agar mewujudkan reformasi yang baik itu dapat terwujud.

Kami sadar bahwa masih banyak kekurangan yang kami miliki, baik dari tulisan maupun bahasan yang kami sajikan. Oleh karena itu, mohon diberikan sarannya agar kami bisa membuat artikel lebih baik lagi. Semoga artikel ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi wawasan kita dalam memahami etika Islam dalam birokrasi pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan penulisan artikel ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmed, F. B. (2020). Conceptualizing Islamic Ethics for Contemporary Muslim Societies. *Intellectual Discourse*, 319-344.
- Alamsyah, Y. A. (2017). Membumikan Sifat Rasul dalam Kepemimpinan Pendidikan: Memosisikan Nabi Muhammad SAW sebagai Panutan dalam Kepemimpinan Pendidikan.

Al-Idarah, 120-141.

- Amelia, L. J. (2018). Benturan Budaya dalam Etika Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 110-119.
- Andriyanto, I. (2016). Analisis Peran Keterlibatan Kerja dalam Hubungan Etika Kerja Islam dan Sikap terhadap Perubahan. *Iqtishadia*, 1-26.
- Anggara, S. (2016). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Anzaikhan, M. (2019). Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam. *Al-Ijtima'i*, 57-80.
- Dr, H. D. (2016). *Etika Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Dr. Farida Wahyu Ningtyas, S. M. (2020). *Panduan Literatur Review untuk Skripsi*. Jember: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.
- Grandani Lontoh; Ventje Kasenda; Josef Kairupan. (2018). Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik (Studi di Kantor Uptd Samsat Tondano Kabupaten Minahasa). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1-15.
- Gufron, U. (2017). Etika BIROKRASI Al-Ghazali. *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman*, 221-246.
- Gultom, M. (2021). Administrasi dalam Pemerintahan Islam. *Ansiru Pai*, 79-99.
- Hairunnisa. (2020). Pengaruh Etika Kerja Islam dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja. *Psikoborneo*, 134-140.
- Imam Tabroni; Dean Dwi Putra; Najah Adawiah; Rosmiati. (2022). Forming Character with Morals Prophet Muhammad Saw. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 41-48.
- Indra Kristian; Anna Tasya Alfitri; Aris Riandi; Astri Febrianti. (2022). Etika Birokrasi sebagai Pencegahan Perilaku Korupsi. *Jurnal Dialektika*:

- Jurnal Ilmu Sosial*, 57-63.
- Jimmy Arief Saud Parsaoran, S. (2017, Desember 13). *Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sdm Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Retrieved Oktober 20, 2022, from Etika dan Moral Administrasi Negara: <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/etika-dan-moral-administrasi-negara>.
- Jusman Iskandar; Alfiah; Amalia Nur Fajriah; Anggun Dwi Rahmawati; Anisa Sofiani. (2020). Etika Birokrat dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 1-10.
- Lusiawati, I. (2019). Memahami Birokrat sebagai Pelayanan Publik dalam Tinjauan Komunikasi Organisasi. *Jurnal Komunikasi dan Bisnis*, 83-89.
- M. Javaid; N. H. Abdullah; A. Zeb; K. Hussain. (2017). The Impact of Authentic Leadership on Knowledge Sharing Behavior with the Moderating Role of Islamic Work Ethics. *Journal of Physics: Conference Series*, 1-11.
- Mamadaliyeva, F. (2018). Morals and Ethics of Islam. *Eastern European Scientific Journal*, 1-5.
- Mashur Hasan Bisri; Bramantyo Tri Asmoro. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 59-76.
- Maulana Yusuf; Bahrul Ulum; M. Rusydi; M. Ishak. (2017). Etika Islam dalam Ranah Politik: Respons dan Tinjauan Kritis Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jambi terhadap Penyelenggaraan Pilkada Langsung (2006-2015). *Miqot*, 139-154.
- Nawawi, Z. (2018). Ethics of Public Administration in the Administration of Governance in Indonesia. *Jiask*, 1-10.
- Ns Utomo; Aris Hartono. (2019). Literatur Review; Panduan Penulisan dan Penyusunan. *Jurnal Keperawatan*, 1-12.
- Putra, M. B. (2020, Oktober 29). *Ombudsman Republik Indonesia*. Retrieved Oktober 7, 2022, from Hukum Pelayanan Publik: <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--hukum-pelayanan-publik>.
- Rodi Wahyudi; Devi Deswimar. (2017). Islam, Perilaku Aparatur Sipil Negara dan Kritik Epistemologi Ilmu Administrasi Negara. *Jurnal An-Nida'*, 50-61.
- Rofiq, A. (2019). Birokrasi, Perilaku, dan Budaya Organisasi dalam Pendidikan Islam. *Dirasah*, 98-116.
- Rusdi; Afrinaldy Rustam. (2021). *Birokrasi Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Shahrul Nizam bin Salahudin; Siti Sarah binti Baharuddin; Muhammad Safizal Abdullah; Abdullah Osman. (2016). The Effect of Islamic Work Ethics on Organizational Commitment. *Procedia Economics and Finance*, 582-590.
- Silvia Amalia Ananda; Achmad Djumlani; Nur Hasanah. (2020). Pengaruh Budaya Birokrasi terhadap Kinerja Aparatur Pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. *E-Journal Pemerintah Integratif*, 528-535.
- Subiyanto; Achmad Machbub. (2016). Pengaruh Etika Kerja Islam terhadap Prestasi Kerja melalui Komitmen Organisasi pada Organisasi Pondok Pesantren Hidayatullah Pati. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 353-367.
- Wahyudi, R. (2020). Maladmnistrasi Birokrasi di Indonesia dalam Perspektif Sejarah. *Niara*, 145-154.
- Wahyuningsih, S. (2022). Konsep Etika dalam Islam. *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman*, 1-9.